

**LAPORAN SINGKAT KOMISI I DPR RI
(KEMENTERIAN PERTAHANAN, KEMENTERIAN LUAR NEGERI, KEMENTERIAN
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, TENTARA NASIONAL INDONESIA, BADAN INTELIJEN
NEGARA, DEWAN KETAHANAN NASIONAL, LEMBAGA SANDI NEGARA, LEMBAGA
KETAHANAN NASIONAL, LPP TVRI, LPP RRI, PERUM LKBN ANTARA, DEWAN PERS,
KOMISI PENYIARAN INDONESIA, DAN KOMISI INFORMASI PUSAT)**

Tahun Sidang	: 2010-2011
Masa Persidangan	: III
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Komisi I DPR RI dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/tanggal	: Rabu, 2 Maret 2011
Waktu	: Pukul 10.00 WIB
Pimpinan Rapat	: Tubagus Hasanuddin, SE, MM
Sekretaris Rapat	: Suprihartini, S.IP
Tempat	: Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Gedung Nusantara II Lt. 1, Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta 10270
Acara	: a. Evaluasi Program Kerja KPI Tahun 2010 b. Penyerapan Anggaran KPI Tahun 2010 c. Program Kerja KPI Tahun 2011
Hadir	: orang dari 50 orang Anggota Komisi I DPR RI : 9 orang Anggota KPI beserta jajaran

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Komisi I DPR RI pada hari Rabu, tanggal 2 Maret 2011 dengan acara sebagaimana tersebut di atas, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Tubagus Hasanuddin, SE, MM, dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN

1. Komisi I DPR RI memberikan apresiasi terhadap kinerja dan Laporan Pertanggungjawaban Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Tahun 2010 dalam bidang kelembagaan, perijinan dan isi siaran. Guna meningkatkan kinerja KPI ke depan, Komisi I DPR RI mendesak KPI melakukan pembenahan sekaligus berupaya secara maksimal mewakili kepentingan masyarakat dalam penyiaran dan mengatur penyiaran di Indonesia, sehingga tercipta siaran yang sehat dan berkualitas. Sejalan dengan itu, Komisi I DPR berkomitmen untuk memberikan dukungan penguatan kelembagaan dan kewenangan KPI yang akan dituangkan dalam RUU Usul Inisiatif Komisi I DPR RI tentang Perubahan Undang-Undang No 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.

2. Mengingat Laporan Pertanggungjawaban Anggaran KPI Tahun 2010 belum disampaikan secara terinci disertai penjelasannya, Komisi I DPR RI minta KPI segera menyerahkan rincian Laporan Realisasi Keuangan 2010 tersebut dan mengajukan rincian APBN-P tahun 2011.
3. Komisi I DPR RI meminta KPI untuk meningkatkan sosialisasi secara intensif dan berkesinambungan mengenai keberadaan, tugas, fungsi, wewenang KPI dan P3SPS kepada penyelenggara siaran, masyarakat umum serta *stakeholder* lainnya yang terkait dengan bidang penyiaran, sehingga masyarakat dapat menindaklanjuti secara cepat terhadap isi siaran yang tidak sesuai dengan kepentingan publik.
4. Mengingat sejumlah media masih menayangkan isi siaran yang mengandung unsur kekerasan, isu sara dan program yang tidak mendidik, serta makin meningkatnya kasus terkait penyelenggaraan penyiaran, Komisi I DPR RI mendesak KPI untuk membuat aturan yang lebih rinci yang dituangkan dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS), sehingga memudahkan KPI dalam menindaklanjuti berbagai kasus pelanggaran yang terjadi.
5. Komisi I DPR RI minta KPI untuk melakukan kajian dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi KPI dan KPID agar dapat memberikan manfaat positif bagi kepentingan publik.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 16.30 WIB.

Jakarta, 2 Maret 2011
KETUA RAPAT,

TUBAGUS HASANUDDIN, SE, MM
A-350